

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tulisan ini akan mengkaji atau membahas tentang tata kelola Pemerintahan Desa dalam mewujudkan *Good Governance*. Dalam konteks ini secara spesifik akan membahas desa Tanjung Menang kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan maksimal dalam suatu desa haruslah mempunyai dasar-dasar yang menjadi acuan. Ketika acuan yang menjadi indikator suatu program telah diterapkan, maka akan lebih mudah dalam proses penilaian baik atau tidaknya tata kelola yang diterapkan suatu struktur.

Desa merupakan unit terkecil di dalam tata kelola struktur pemerintahan, walaupun desa merupakan unit terkecil, desa tidak kehilangan “pamor” nya. Akhir-akhir ini pembicaraan tentang Desa sangat sering dibicarakan oleh masyarakat karena keseksian desa menjadi isu baru dikala pemerintahan Presiden Jokowi-Jk. Salah satunya adalah Dana Desa yang besar merupakan salah satu aspek yang sering kali dibicarakan masyarakat pada saat ini.

Dana Desa bertujuan untuk bagaimana masyarakat dapat membangun Desa atau membangun Negara dari tingkatan yang paling rendah yaitu, dengan mengembangkan apa yang ada didesanya. Tetapi banyak sekali aspek-aspek negatif juga ketika dana Desa yang begitu besarnya mengakibatkan banyak orang bertarung dalam Kontestasi (Pemilihan Kepala Desa) dengan tujuan yang terkadang tidak sesuai atau tidak mengutamakan kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama.

Dalam pengelolaan dana desa seorang pemimpin harus amanah untuk merealisasikan dana desa tersebut untuk kepentingan warga desa. Seperti yang dijelaskan dalam Alqur'an Surat An-nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dari arti surat Annisa ayat 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”, Kalimat ini mencakup seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, dan yang paling pertama adalah bagi para pemimpin dan penguasa yang wajib bagi mereka menunaikan amanat dan mencegah kezaliman, dan senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan mereka. Dan masuk dalam perintah ini juga selain mereka, sehingga mereka wajib menunaikan amanat yang mereka punya dan senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan kesaksian dan kabar berita.¹

Saat direalisikannya dana desa banyak orang hanya merebutkan dana desa untuk keperluan pribadi mereka sehingga Dana Desa yang telah dikeluarkan oleh

¹ Diakses dari <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58> tanggal 03 September 2019 Jam 09.20 WIB

pemerintah tidak dikelola dengan baik dan tidak diurus dengan baik sehingga kemajuan-kemajuan desa yang diharapkan oleh pemerintah pusat tidak terealisasi. Oleh karena itu, perlu adanya keseriusan dari semua elemen Desa untuk memaksimalkan dana-dana ataupun pendapatan-pendapatan di desa itu dalam proses meningkatkan kualitas desa tersebut. Tata kelola yang baik itu berdasarkan latar belakang ilmu-ilmu yang mungkin bisa di terapkan dalam proses penerapan tata kelola Desa yang baik. Peneliti dalam hal ini akan melihat perbandingan tata kelola Kepala Desa periode 2002-2010 dengan Kepala Desa periode tahun 2010-2016.

Perbandingan ini menjadi menarik karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembangunan dan pengelolaan Desa antara kedua Kepala Desa baik itu dalam bidang pelayanan masyarakat maupun pembangunan. Di bidang pelayanan, Kepala Desa tidak mampu secara maksimal melayani masyarakat seperti (kk, ktp, juga surat domisili) dan dibidang pembangunan tidak tampak dalam bentuk yang nyata, Hal ini terlihat pada masa Pemerintahan Kepala Desa sebelumnya tidak berjalannya Pemerintahan Desa yang ideal dengan indikasi minimnya Pembangunan misal, tidak adanya kantor Kepala Desa, pelayanan publik yang tidak transparansi, dan akses jalan yang tidak memadai.

Masyarakat menuntut Pemerintah agar memberikan perhatian yang maksimal dalam menjalankan suatu Pemerintahan dan memberantas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme sehingga terciptanya Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan

pelayanan yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadist yang menjelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنْتُكُمْ رَاعٍ وَكُنْتُكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلْمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْنُونَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ فَكُنْتُكُمْ رَاعٍ وَكُنْتُكُمْ مَسْنُونٌ

Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (buchary, muslim).

Pada dasarnya, hadist di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan

bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, gubernur, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten muara enim mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini juga terlihat dari perbandingan antara Desa Tanjung Menang itu sendiri dengan Desa-Desa yang berada di sekitarnya. Adapun hal yang menjadi perbandingan kemajuan antara Desa Tanjung Menang dengan Desa-Desa di sekitarnya adalah infrastruktur (Akses jalan, Pembangunan, ekonomi masyarakat, dan dalam bidang pelayanan masyarakat).

Untuk itulah peneliti akan membuktikan asumsi-asumsi tersebut dalam perspektif *Good Governance*. *Good governance* dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai sebuah standart pengelolaan pemerintahan yang di susun oleh Bank Dunia atau *IMF* (*International Monetary Fund*). sehingga akan tergambarkan perbandingan tata kelola desa oleh kedua kepala desa tersebut .

Good Governance merupakan praktek penyelenggaraan Pemerintahan yang ideal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak bisa lepas dari profesionalisme penyelenggaraan Pemerintahan yaitu aparatur Pemerintahan yang bermoral dan mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau selain itu dalam menjalankan Pemerintahan sangat diperlukan keterbukaan aparatur Pemerintah agar dapat tercipta kepercayaan timbal balik antara

Pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.²

Dari pemaparan diatas dapat dilihat, terdapat banyak permasalahan yang belum terurai dan masih memberikan celah untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga peneliti menarik untuk melihat lebih jauh tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan teliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termaksud dalam ruang lingkup masalah penelitian dan factor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.³

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya ingin mengkaji bagaimana pola tatakelola yang dibangun oleh kedua kepala desa dari periode tahun 2002-2010 dengan kepala desa periode tahun 2010-2016. Yaitu, tidak akan melebar ke aspek-aspek lainnya hanya akan melihat tatakelola yang dibangun apakah sudah tertuju atau belum sehingga tidak melebar kemana-mana.

C. Rumusan Masalah :

² Apphia Rantengpasang, Johannis E Kaawoan, Franky R. D. Rengkung ,“Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung,” Vol 1, No 1 (2017) hlm.2

³Dadung Abdurrahman, ,”*Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Ombak2011), hlm.126

1. Bagaimanakah dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa di periode 2002-2010 dengan periode 2010-2016 ?
2. Bagaimana peran Kepala Desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim tahun 2010-2016 ?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai beberapa tujuan. Untuk apa melakukan sebuah penelitian jika tidak mempunyai tujuannya, oleh karena itu penulis yang membaginya menjadi dua kriteria tujuan :

1. Untuk mengetahui perbandingan antara Kepala Desa periode 2002-2010 dengan Kepala Desa periode 2010-2016.
2. Untuk mengetahui hasil kinerja dari kedua Kepala Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentunya mempunyai beberapa manfaat. Untuk apa melakukan sebuah penelitian jika tidak bermanfaat, oleh karena itu penulis membaginya menjadi dua kriteria manfaatyakni sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil ini penelitian ini diharap memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu agama dan khasana pengetahuan di ilmu politik Islam,
2. Secara Praktis, hasil penelitian menjadi acuan bagi akademisi dan penelitian berikutnya.

F. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *Government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *Governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakn publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik untuk kehidupan warganya.

Salah satunya William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli salah satunya William N. Dunn adalah:

1. Bahwa kebijakan publik selalunya mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.

3. bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
4. bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Pada hakikatnya kebijakan publik di buat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Proses-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Padaakhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing actor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen Pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdayafinansial dan manusia.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan public pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Pemaparan tentang tahap kebijakan diatas telah menjelaskan bahwa tahap kebijakan tersebut merupakan suatu proses yang saling terkait yang mempengaruhi satu sama lain. Tahap awal adalah penyusunan agenda, dalam tahap tersebut dilakukanya identifikasi persoalan (masalah) publik yang akan dibahas dalam tahap berikutnya, yaitu formulasi. Setelah diformulasikan, pada tahap adopsi akan dipilih alternatif yang baik agar dijadikan solusi bagi pemecahan masalah publik. Kebijakan yang telah diputuskan dan disahkan akan diimplementasikan untuk meraih tujuan awal yang ditentukan. Pada tahap akhir, evaluasi kebijakan.⁴

Dalam suatu kebijakan itu harus diukur baik atau tidaknya untuk mengukur suatu kebijakan baik atau tidaknya haruslah berdasarkan indikator-indikator yang jelas dan terukur. *Good governance* merupakan salah satu “jalan” untuk melihat

⁴William N.Dunn, 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,), hlm24.

lebih jauh bagaimana kebijakan publik itu sudah melewati tahapan-tahapan yang seharusnya dilalui oleh karena itu perlu elaborasi lebih mendalam tentang bagaimana *Good Governance* dalam kebijakan publik.

a. Pengertian *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁵

Dapat dikatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal *and political frame work* bagi tumbuhnya

⁵Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm 1-2

aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

b. Ciri-Ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *united nation development programme (UNDP)* lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

- 1.Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggungjawab, efektif dan adil.
- 2.Menjamin adanya supremasi hukum.
- 3.Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- 4.Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.⁶

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses

⁶Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance*,(Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003).Hlm 3

pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

c. Prinsip-Prinsip *Good governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:⁷

1. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua,

⁷Dede Rosyada Dkk, "*Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*", (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm 182

pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.

2. Penegakan hukum(*Rule Of Law*)

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.

3. Transparansi (*Transparency*)

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan *supervisor* kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik di bidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.

4. Responsif (*Responsiveness*)

Salah satu untuk menuju cita *good governance* adalah responsif, yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan-kepentingan bersama.

5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

Aspek fundamental untuk cita *good governance* adalah perhatian supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.

6. Kesetaraan dan keadilan (*Equality*)

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan

yang timbul. Proses pengelolaan supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.

7. Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisiensi ini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitas untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisiensi dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

8. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.

9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakan-kebijakan.⁸

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan kajian penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian lain, penting kiranya untuk memaparkan karya ilmiah lain yang juga membantu dalam penelitian yang penulis lakukan tentang Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*.

Pertama, Jurnal dengan judul “ *Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung*” yang ditulis oleh Apphia Ranteng Pasang , Johannis E Kaawoan, Dan Franky R. D. Rengkung. Dalam jurnal ini peneliti menemukan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik tidak terlepas dari perwujudan pemerintahan yang baik, terlebih di wilayah kelurahan yang bersinggungan dengan masyarakat, keluhan-keluhan terhadap buruknya kualitas pelayanan di kelurahan menunjukkan bahwa belum terwujudnya Pemerintahan yang baik dalam skala kelurahan.⁹

⁸Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182

⁹Apphia Rantepasang, Johannis E Kaawoan, Frankyr. D. Rengkung . “*Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Suatu Studi Di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung*”. Vol. 1 No. 1.2017,hlm 2

Kedua, Jurnal dengan judul Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ” *Good Governance dan Governability* ” yang ditulis oleh Pratikno, Dalam jurnal ini peneliti mengetahui bahwa *good governancet* telah menempati posisi yang paling terhormat dalam wacana pembangunan belakangan ini. Tatkala Sidang Umum *Millennium Summit* PBB mendeklarasikan *Millenium Deaelopment Goals* pada bulan September 2000, PBB juga mengkaitkannya dengan *good governance*. Hal serupa juga terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Terminologi *Good Governance* telah melanda seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok nusantara.

Slogan reformasi politik yang pernah sangat populer dan berenergi di tahun 1998-1999, ternyata tidak berusia terlalu lama, dan kemudian tidak banyak lagi digunakan. Namun wacana *Good Governance* bisa tetap bertahan sekarang ini, dan seakan-akan menjadi simbol dari masuknya Indonesia dalam standar kehidupan global. Masyarakat desa yang tidak berbahasa Inggris pun bisa fasih untuk melafalkan *Good Governance*. istilah *Governance* dan *Government* cenderung digunakan secara bergantian untuk menggambarkan proses pemerintahan. Tatkala *Government* digunakan merujuk pada pelaku (Pemerintah), maka *Governance* biasanya digunakan untuk merujuk pada prosesnya (Pemerintahan).¹⁰

Ketiga, Jurnal dengan judul “*Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis*” yang ditulis oleh Suharko, Dalam jurnal ini peneliti mengetahui bahwa Konsep tata pemerintahan bukanlah konsep baru; ia setua usia

¹⁰Pratikno, “*Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Good Governance Dan Governability)*” Vol.8 No.3, Tahun 2005, hlm 231

sejarah manusia itu sendiri. Akan tetapi konsep ini menjadi bagian dari perdebatan intelektual sejak 1980-an. Meskipun ada konsensus bahwa konsep tata Pemerintahan (*Governance*) umumnya lebih luas ketimbang konsep Pemerintah (*Government*), definisi tata Pemerintahan bervariasi secara substansial. Berbagai organisasi internasional dan ahli memiliki definisi sendiri-sendiri tentang tata pemerintahan. Misalnya, Bank Dunia mendefinisikan tata pemerintahan sebagai cara menjalankan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara, dan UNDP mendefinisikannya sebagai pelaksanaan otoritas administratif, politik dan ekonomi untuk mengelola persoalan-persoalan negara disemua tingkatan.¹¹

Keempat, jurnal dengan judul “ *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*” yang ditulis oleh Muhammad Ilham Arisaputra, dalam hal ini peneliti memahami bahwa istilah *Governance* tidak sama dengan *Government*. Bahwa konsep “*Government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan Pemerintahan). Konsep “*Governance*” melibatkan tidak sekedar Pemerintahan dan Negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar Pemerintahan dan Negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian, pembangunan

¹¹Suharko , “*Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan yang Demokratis*”. Vol.8 No.3, Tahun 2005, hlm 263

berkelanjutan dan keadilan sosial dan aspek-aspek fungsional dari Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud *Good Governance* menurut LAN adalah penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga “Kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat.¹²

Kelima, jurnal dengan judul “*Good Governance dalam Pemerintah Daerah*” yang ditulis oleh Noverman Duadji, didalam jurnal ini peneliti memahami bahwa *Governance* merupakan kerangka konsep untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan agar memiliki kinerja tinggi. Merespon hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai landasan legal formal, mulai dari Kebijakan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sampai dengan Kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam rangka mencapai *good governance*, guna menuju kinerja pemerintahan yang tinggi, maka 3 pilar *good governance*: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan partisipasi (*participation*) haruslah diimplementasikan dengan baik melalui tindakan nyata dalam bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai *good governance* dalam praktek-praktek penyelenggaraan urusan publik dengan landasan legal formal.¹³

H. Metode Penelitian

¹²Muhammad Ilham Arisaputra, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia*”. Vol.28. No.2, 2013, hlm 189

¹³Noverman Duadji, “*Good Governance dalam Pemerintah Daerah*” Vol. 28, No. 2, 2012, hlm 201

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu Methodos yang berarti cara atau jalan untuk mencapai sasaran atau tujuan dalam pemecahan suatu masalah. Dalam artian suatu usaha untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu, dengan cara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi metode penelitian adalah suatu cara dalam hal pemecahan terhadap suatu masalah yang sedang di hadapi.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistem deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus, yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana perkembangan Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Metode kualitatif memiliki pendekatan yang beragam dalam penelitian akademis, prosedur kualitatif lebih mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda¹⁵.

Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data data,

¹⁴Tim Dosen,*Pedoman Penulisan Skripsi* : Fakultas Adab Adab Dan Humaniora Palembang,, 2013, hlm. 21

¹⁵Jhon W. Creswell.*Research Design*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Edisi 4. 2016) hlm. 207

menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.¹⁶

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan serta hasil dari pengamatan yang dilakukan di lapangan. Selain itu juga data yang didapat dari sumber-sumber arsip dari Desa Tanjung Menang Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden dan narasumber dengan melakukan kegiatan wawancara, dokumentasi dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Data Sekunder

Selain menggunakan sumber data Primer peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder biasa diperoleh dari buku-

¹⁶Pof.Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta. 2014, hlm.222

buku, literatur, karya ilmiah dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan tema penelitian.

I. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi adalah metode yang digunakan peneliti dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Berdasarkan observasi, peneliti diharapkan dapat melakukan pengamatan dengan menggunakan seluruh indranya demi mendapatkan data yang relevan bagaimana mengetahui perkembangandesatanjungmenangkabupaten Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim selama periode 2002-2008 dengan 2010-2016.

b. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk mendukung data-data pada lokasi penelitian sehingga dapat dibuktikan secara akademis. Studi pustaka dapat berasal dari buku, jurnal dan karya ilmiah akademis yang berkaitan dengan judul penelitian sehingga mempermudah peneliti untuk menganalisis dan mendeskripsikan pokok pikiran dalam penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan sebagai data pendukung peneliti untuk mengingat kembali data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dokumentasi bisa

didapatkan dari beberapa catatan peneliti saat dilapangan, majalah atau koran, file berupa audio maupun visual sesuai kebutuhan peneliti.

d. *Interview* (Wawancara)

Dalam wawancara, peneliti harus memilih sumber informasi yang sesuai dengan objek penelitian dari beberapa pihak yang berkaitan dengan kepentingan penelitian. Dalam pelaksanaanya, wawancara yang dilakukan adalah wawancara semiterstruktur. Hal tersebut memungkinkan peneliti bisa meminta pendapat maupun ide narasumber karena peneliti harus mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan secara jelas. Dalam hal ini yang akan di wawancarai , yaitu : (Kepala Desa periode 2002-2010, Kepala Desa 2010-2016, Struktur perangkat desa periode 2002-2010, Masyarakat Desa Tanjung Menang).

J. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Analisa data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.¹⁷

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data lapangan Model Miles *and* Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus carara tuntas. Langkah-langkah analisis data model miles and huberman yaitu.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. data yang direduksi akan memberikaan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selajutnya, dan mencarinya bila diperlaluakan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.¹⁸

¹⁷Sugiyono.*Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*,(Bandung:Alfabeta.Tahun ,2013), Hlm.244

¹⁸Sugiyono.*Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*,(Bandung:Alfabeta, Tahun 2013)hlm. 245-247

3. Manipulasi Data

Manipulasi Data yaitu bentuk analisis yang mengubah atau menyederhanakan data setelah data digolongkan dan dipecah-pecah dalam kelompok-kelompok, yang kemudian, dilakukan manipulasi data sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesa atau pertanyaan penelitian. Selain itu juga, mengadakan manipulasi terhadap data mentah berarti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antarfenomena, sehingga data-data mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasi.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langka ke tiga dalam analisis data Kualitatif menurut Miles *and* Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap Pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kealitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya.

Masih remang-remang atau gelap¹⁹ sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²⁰

K. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penguraian masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibuat dalam Empat BAB. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Bagian pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Penelitian yang menjelaskan gambaran umum yang meliputi sejarah Desa Tanjung Menang, keadaan kepala desa, kondisi umum Desa Tanjung Menang, visi dan Misi Kepala Desa, keadaan Desa Tanjung Menang.

BAB III :Pembahasan dan Analisis data yang berisi tentang, perbandingan Kepala Desa Tahun 2002-2010 dengan Kepala Desa Tahun 2010-2016.

BAB IV : Merupakan penutup yang akan mengemukakan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari seluruh penelitian ini.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*(Bandung:Alfabeta, Tahun 2013), hlm 252

²⁰Ibid, hlm 246